

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukan bahwa krisis ideologi dalam masyarakat modern bukan sekedar ungkapan teoritis, terutama menyangkut bentuk komunikasi dan cara warga memahami serta mengartikulasikan makna ideologis secara kolektif. Melalui pendekatan rasionalitas komunikatif yang ditawarkan oleh Jürgen Habermas, dapat dibaca bahwa dominasi rasionalitas instrumental dalam sistem sosial telah mereduksi ruang komunikasi menjadi saluran satu arah dimana makna diproduksi oleh elit dan diterima begitu saja oleh publik. Di sinilah muncul kebutuhan untuk membangun ulang basis komunikasi publik melalui tindakan komunikatif yang setara, bebas dari dominasi dan berorientasi pada pemahaman bersama yang organik. Dalam konteks Indonesia, problem ini tercermin dalam cara Pancasila diformalisasikan secara simbolik dan normatif, namun minim ruang untuk dipertanyakan dan dikembangkan dalam diskursus warga. Maka, krisis Pancasila hari ini adalah krisis komunikatif, ketika ideologi kehilangan habitat alaminya yakni dialog, tafsir dan partisipasi publik.

Rasionalitas komunikatif Habermas membuka jalan bagi pembacaan ulang atas Pancasila, bukan sebagai teks suci yang sakral, tetapi sebagai medan terbuka yang terus hidup dan berkembang dalam diskursus publik. Keadilan, dalam kerangka ini, tidak hanya dimaknai sebagai hasil dari distribusi kebijakan, tetapi sebagai hasil dari partisipasi yang setara dalam proses pembentukan norma dan makna. Ketika warga negara diberi ruang untuk menyampaikan, menguji dan merevisi makna kebangsaan secara aktif, maka Pancasila tidak hanya akan menjadi simbol melainkan menjadi substansi yang aktual dan relevan. Di sinilah letak pentingnya revitalisasi ruang publik sebagai tempat dimana makna Pancasila dibentuk melalui pertemuan nalar antar warga, bukan sekedar disodorkan oleh institusi negara. Bahkan salah satu ruang yang paling potensial untuk menghidupkan diskursus ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Melalui kelas-kelasnya yang terbuka dan reflektif, peserta didik dapat dilatih untuk memahami Pancasila tidak sebagai dogma melainkan sebagai ide yang dapat diperbincangkan secara rasional. Dalam kerangka emansipatoris ini, Pancasila tidak dilihat sebagai final atau titik akhir, melainkan awal dari proyek kebangsaan yang selalu ‘menjadi’.

Sehingga penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa Pancasila hanya akan hidup apabila diletakkan dalam ruang ideologis yang terbuka, dimana warga tidak hanya menjadi objek dari makna, tetapi menjadi subjek aktif dalam menafsirkan dan memperjuangkannya. Dalam ruang semacam itu, perbedaan bukan dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan kondisi yang dirawat bersama. Inilah visi ideologi yang tidak represif, melainkan deliberatif. Dengan pendekatan hermeneutika filosofis dan landasan teori tindakan komunikatif, penelitian ini tidak hanya mengkritisi cara berideologi yang eksklusif dan monologis, tetapi juga menawarkan horizon baru bahwa makna kebangsaan harus diilhami melalui kehidupan. Bahwa ia senantiasa harus dibentuk melalui percakapan yang jujur, setara dan berkelanjutan.

## 5.2 Saran

Penelitian ini tidak jatuh pada relativisme atau juga sombong untuk mengklaim dirinya sebagai kebenaran yang final. Penelitian ini akan selalu terbuka dan justru karena keterbukaannya, pemikiran yang telah dibangun dalam kerangka diskursif ini diharapkan bisa terus dikembangkan melalui percakapan, kritik dan reinterpretasi yang sehat. Sebagaimana Pancasila tidak boleh dimaknai secara tunggal dan tertutup, demikian pula pemikiran tentangnya harus terus dihidupkan dalam ruang akademik dan praksis sosial-politik yang reflektif. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran berikut untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan yakni:

1. Bagi akademisi dan peneliti, disarankan agar pendekatan komunikasi dan hermeneutika lebih dikembangkan dalam studi-studi tentang ideologi dan kebangsaan.

2. Bagi pembuat kebijakan, penting untuk menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar hukum atau alat legitimasi kebijakan, melainkan sebagai inspirasi nilai yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Pendekatan partisipatif dalam menyusun kebijakan dapat menjadi jalan bagi praktik ideologi yang inklusif.
3. Bagi lembaga pendidikan, Pancasila perlu diajarkan bukan hanya sebagai hafalan dan doktrin normatif, tetapi sebagai proyek diskursus yang terbuka. Kurikulum harus memberi ruang kepada peserta didik untuk terus berdialog dan menguji makna Pancasila dalam konteks yang aktual.
4. Bagi masyarakat luas, kesadaran untuk memaknai Pancasila sebagai ruang ideologis yang dinamis perlu terus dibangun melalui budaya diskusi, literasi kritis dan keberanian untuk mempertanyakan bentuk-bentuk dominasi simbolik yang mengerdilkan kebhinekaan.

Dengan menyampaikan saran-saran itu penulis tidak bermaksud menutup ruang diskusi, melainkan ingin memperpanjang denyutnya. Dalam dunia yang terus berubah dan kompleks ini tidak ada makna yang bisa dikekalkan tanpa partisipasi kolektif dalam menafsirkannya. Maka, sebagaimana rasionalitas komunikatif tidak akan pernah usai, selama itulah manusia akan terus ‘ingin’ saling memahami, demikian juga pada pemaknaan Pancasila yang akan terus hidup sejauh kita bersedia untuk membicarakannya bersama.